

SKRIPSI



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENIKAH LAGI TANPA IZIN DARI ISTRI SEBELUMNYA SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM KUHP

(Studi Kasus Putusan Nomor : 757 / Pid.B / 2011 / PN.Mks)

Disusun Oleh

ANDI AGUS RAKHMAD PUTRA JAYA

B 111 06 835

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2014

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENIKAH LAGI
TANPA IZIN DARI ISTRI SEBELUMNYA SEBAGAIMANA YANG DIATUR
DALAM KUHP**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 757 / Pid.B / 2011 / PN.Mks)

Disusun dan Diajukan

Oleh

ANDI AGUS RAKHMAD PUTRA JAYA

B 111 06 835

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana**

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : Andi Agus Rakhmad Putra Jaya

NIM : B 111 06 835

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menikah Lagi Tanpa Izin Dari Istri Sebelumnya Sebagaimana Yang Diatur Dalam KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor : 757 / Pid. B / 2011 / PN. Mks)”**.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Januari 2014

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP : 19620711 198703 1 001

Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP : 19800710 200604 1 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Andi Agus Rakhmad Putra Jaya
NIM : B 111 06 835
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menikah Lagi Tanpa Izin Dari Istri Sebelumnya Sebagaimana Yang Diatur Dalam KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor : 757 / Pid. B / 2011 / PN. Mks)”.

Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi Sebagai Ujian Akhir Program Studi.

Makassar, Januari 2014

**a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik**

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA POLIGAMI YANG
TIDAK MENDAPAT IZIN DARI ISTRI PERTAMA SEBAGAIMANA YANG
DIATUR DALAM KUHP

(Studi Kasus Putusan Nomor : 757 / Pid.B / 2011 / PN.Mks)

Disusun dan Diajukan Oleh

ANDI AGUS RAKHMAD PUTRA JAYA

B 111 06 835

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk
dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Bagian Hukum
Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Pada hari, Januari 2014

Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP : 19620711 198703 1 001

Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP : 19800710 200604 1 001

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

ANDI AGUS RAKHMAD PUTRA JAYA (B111 06 835), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menikah Lagi Tanpa Izin Dari Istri Sebelumnya Sebagaimana Yang Diatur Dalam KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor : 757 / Pid. B / 2011 / PN. Mks)”. Di Bawah Bimbingan M. Said Karim Selaku Pembimbing I dan Amir Ilyas Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana menikah lagi tanpa izin dari istri sebelumnya dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menikah lagi tanpa izin dari istri sebelumnya dalam putusan perkara nomor 757 / Pid. B / 2011 / PN. Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya pada instansi Pengadilan Negeri Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan turun langsung kelapangan (Pengadilan Negeri Makassar) untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (I) Penerapan hukum pidana materil oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana menikah lagi tanpa izin istri sebelumnya sudah sesuai karena Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum) sudah menjelaskan unsur tindak pidana menikah lagi tanpa izin istri / suami sebelumnya, selain itu adanya 4 (empat) alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan ternyata kesemuanya terbukti di Pengadilan; dan (II) Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana poligami yang dilakukan oleh terdakwa Suparjo Rustam dalam putusan perkara nomor : 757 / Pid.B / 2011 / PN.Mks dalam pertimbangan hukum oleh hakim sudah tepat karena telah mempertimbangkan dari semua faktor, sehingga pertimbangan hakim tersebut dianggap adil oleh para pihak (terdakwa dan korban), ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dan masing-masing pihak merasa puas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN YME yang telah memberikan curahan kasih sayangNya kepada penulis, penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul :“ **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menikah Lagi Tanpa Izin Dari Istri Sebelumnya Sebagaimana Yang Diatur Dalam KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor : 757 / Pid. B / 2011 / PN. Mks)**”.

Dalam Kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis Ayahanda **Andi Baharuddin Petta Ongkang** dan Ibunda **Danu Agustin Iriani**, atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta doanya demi keberhasilan penulis, Kepada saudara penulis Andi Ayu Octavia yang tak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis, Kepada Istri tercinta Satriani, S.Far. yang terus memberikan motivasi agar penulis cepat sarjana. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar Andi Cekele Petta Lura atas segala bantuannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Melalui kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., SP.BO., beserta Wakil Rektor lainnya;

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Prof. Dr. Ansori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III
4. Ketua Bagian Hukum Pidana Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si., dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana Ibu Nur Azisa, S.H., M.H.
5. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembimbing II.
6. Para Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membekali ilmu kepada penulis.
7. Bapak Mustari, S.H., dan para Nara Sumber yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian skripsi ini.
8. Seluruh Sahabat-sahabatku Andi Alti, Agung Irawan, Ibim Adnan, Bakento Crew, G2 Hart Community serta seluruh angkatan 2006 yang telah bersama-sama penulis saat suka dan duka dari awal menjadi Mahasiswa dan telah banyak menghibur dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan

skripsi ini. Akhir kata, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Makassar, Januari 2014

Penulis

Andi Agus Rakhmad Putra Jaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana.....	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
B. Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana Pernikahan Lagi Tanpa Izin Istri Sebelumnya.....	12
1. Pengertian Poligami	12
2. Tindak Pidana Poligami.....	13
3. Unsur-Unsur Perkawinan Dalam Pasal 279 Ayat (1) KUHP	15
C. Tinjauan Umum Terhadap Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	18

D. Pidana dan Pemidanaan.....	23
1. Pengertian Pidana.....	23
2. Teori Tujuan Pemidanaan	24
3. Jenis-Jenis Pidana	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Lokasi Penelitian.....	38
B. Jenis dan Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
D. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Poligami Yang Tidak Mendapat Izin Dari Istri Sebelumnya Dalam Putusan Perkara Nomor 757 / Pid. B / 2011 / PN. Mks.....	40
B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Poligami Yang Tidak Mendapat Izin Dari Istri Sebelumnya Dalam Putusan Perkara Nomor 757 / Pid. B / 2011 / PN. Mks.	50
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian yuridis yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada. Tinjauan yuridis yang menggunakan dasar-dasar hukum, teori dan perundang-undangan dalam mengkaji suatu masalah, menjadi sangat penting dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang hendak dikaji. Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Paul Scholten bahwa “hukum itu ada namun harus ditemukan” (**Satjipto Rahardjo**, 2006:124).

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya dalam waktu yang lama (**Sulaiman Rasyid**, 2001:374). Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Perkawinan adalah pola hidup para nabi, benteng para ahli taqwa dan kebanggaan para *waliyullah*. Dalam suatu kehidupan perkawinan tercipta suatu kelompok baru yang disisi dengan suami dan isteri serta anak-anak yang terlahir dari suatu perkawinan yang dilakukan dengan cara yang

dibenarkan oleh norma, baik itu norma agama, norma susila dan norma hukum.

Suatu kehidupan rumah tangga, untuk terciptanya suatu keluarga yang *sakinah* (pondasi) *mawaddah* (kasih sayang) dan *warahmah* (kewajiban) harus ada keseimbangan tugas antara suami, isteri dan anak-anak. Ketentraman hidup dalam rumah tangga menjadi suatu cita-cita yang harus dicapai dalam kehidupan berkeluarga. Rumah tangga Rasulullah SAW, harus menjadi contoh ummat. Untuk terciptanya suatu ketentraman dalam rumah tangga maka harus ada rasa kasih sayang, rasa kebersamaan, kesenangan dan saling percaya.

Namun, ketika dalam suatu kehidupan perkawinan itu diisi dengan banyak kebohongan dan tidak adanya rasa kebersamaan, kasih sayang dan menghargai maka akan terciptalah suatu pertengkaran yang bisa mengakibatkan banyak hal, baik itu pertengkaran, perceraian dan bahkan poligami. Dalam Antropologi Sosial, Poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu Suami atau Isteri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan). Elbert Hubbard, seorang penulis Amerika Serikat (**Islah Gusmian**, 2007:13) menyatakan poligami adalah sebuah usaha untuk mendapatkan lebih banyak dari yang semestinya diberikan oleh kehidupan. Poligami adalah tradisi yang telah lama berlaku sebelum Islam datang, dan berkembang disemua wilayah, pada suatu saat ketika perempuan dianggap sebagai *spesies* khusus antara manusia dan hewan (**Islah Gusmian**,

2007:30). Poligami merupakan perkara yang telah lama sekali, namun tidak diketahui adanya aturan yang jelas, kecuali dalam syari'at Islam.

Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini sudah tidak lagi dipatuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat, oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi atau penegakan hukum. Karena melalui instrument hukum, menurut **Bambang Waluyo** (2008:2) diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif, mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

Praktik poligami bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam saja, namun poligami merupakan sejarah seluruh umat manusia. Agama-agama besar di dunia memang beragam dalam memandang masalah poligami. Pada masyarakat Hindu zaman dulu, misalnya, telah terjadi praktik poligami maupun poliandri (**Islah Gusmian**, 2007:31). Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) mengatur tentang perkawinan lebih lanjut. Dalam Pasal 1 UU Perkawinan ini menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan poligami sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Saat ini kejahatan semakin hari semakin bertambah, baik itu dari segi kualitas (jenis poligaminya) maupun dari segi kuantitasnya (jumlah pelaku poligami). Menurut **Aristoteles (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009:1)** menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Situasi dan kondisi yang sedemikian rupa inilah, kiranya kejahatan yang terjadi dapat diperhatikan lebih serius lagi baik dari aparat yang berwenang maupun partisipasi masyarakat, maupun secara operasional didalam penyelesaiannya belumlah memuaskan.

Ada yang melakukan perkawinan poligami berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh aturan undang-undang, namun ada juga orang-orang melakukan poligami diluar prosedur yang telah ditentukan undang-undang. Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami lunak lain halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau BW yang menganut asas monogami keras. Dari kedua ketentuan tersebut yang berlaku untuk hal perkawinan adalah Undang-undang Perkawinan. Ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang di atur dalam Undang-undang lain telah dimasukkan dalam Undang-undang perkawinan termasuk yang ada dalam BW.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (*Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers* S. 1993 No. 4), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling Op De Gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa seorang laki-laki boleh melakukan perkawinan poligami dengan syarat-syarat antara lain :

- a. Adanya persetujuan isteri atau isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pasal 279 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, atau barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Setiap orang yang melakukan perkawinan poligami tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dapat dituntut menurut Pasal 279 KUH Pidana. Meskipun demikian perkawinan poligami tidak sesuai dengan aturan Undang-undang atau disebut juga poligami liar yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang tidak tersentuh oleh hukum namun ada juga tindak pidana perkawinan itu dituntut berdasarkan Pasal 279 KUH Pidana tersebut.

Penjatuan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum (**Ninie Suparni**, 2007:5), yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat. Adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut, sering kali dilakukan namun hasilnya lebih kepada kegagalan. Sehingga usaha yang dilakukan oleh manusia yakni hanya menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai Tindak Pidana Poligami dalam KUHP, sehingga penulis memilih judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menikah Lagi Tanpa Izin Dari Isteri Sebelumnya Sebagaimana Yang**

Diatur Dalam KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 757 / PID. B / 2011 / PN.Mks)”.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka berikut ini diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana menikah lagi tanpa izin dari isteri sebelumnya ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menikah lagi tanpa izin dari isteri sebelumnya dalam putusan perkara nomor 757 / Pid. B / 2011 / PN. Mks ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui ;

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana menikah lagi tanpa izin dari isteri sebelumnya.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menikah lagi tanpa izin dari isteri sebelumnya dalam putusan perkara nomor 757 / Pid. B / 2011 / PN. Mks.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana menikah lagi tanpa izin dari isteri sebelumnya dan sering terjadi di masyarakat.
2. Sebagai sumbangan pemikiran / masukan kepada pihak aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani kasus tindak pidana menikah lagi tanpa izin dari isteri sebelumnya di wilayah hukum Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam **WvS** Belanda, dengan demikian juga **WvS** Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana”, **Adami Chazawi** (2002:67-68) menerangkan bahwa di Indonesia sendiri setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* (Belanda). Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana,

peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan perbuatan sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.

Adapun istilah yang dipakai **Moeljatno** dan **Roeslan Saleh (Andi Hamzah, 2008:86)** dalam menerjemahkan *Strafbaar feit* adalah istilah perbuatan pidana, dan **Leden Marpaung (2009:7)** menggunakan istilah “delik” **Ter Haar (Moeljatno, 2002:18)** memberi definisi untuk delik yaitu tiap-tiap gangguan keseimbangan dari satu pihak atas kepentingan penghidupan seseorang atau sekelompok orang. Definisi lain diterangkan bahwa definisi delik adalah perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang atau hukum dimana si pelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana atas perbuatannya tersebut (**Yan Pramadya Puspa, 1977:291**).

Menurut **Bambang Waluyo (2008:6)** pengertian tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare Feiten*). **R. Abdoel Djamali (2005:175)** menambahkan bahwa peristiwa pidana yang

juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Selanjutnya menurut **Pompe (P.A.F. Lamintang, 1997:182)** perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” .

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu :
 - Mencocoki rumusan delik
- b. Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu :
 - Adanya kesalahan (terdiri dari ***dolus*** dan ***culpa***)
 - Melawan hukum.

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap

bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Pelaku utama,
2. Pelaku peserta,

Untuk menentukan apakah seorang pelaku tergolong kedalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Menikah Lagi Tanpa Izin Dari Isteri Sebelumnya

1. Pengertian Poligami

Poligami ialah mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama. Berpoligami atau menjalankan (melakukan) poligami sama dengan poligini yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama. Drs. Sidi Ghazalba mengatakan bahwa Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan. Sebenarnya istilah poligami itu mengandung pengertian poligini dan poliandri. Tetapi karena poligami lebih banyak dikenal terutama di Indonesia dan negara-negara yang memakai hukum Islam, maka tanggapan tentang poligini ialah poligami

(<http://banjirembun.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-hukum-poligami.html>).

2. Pengertian Tindak Pidana Menikah Lagi Tanpa Izin Dari Isteri Sebelumnya

Tindak pidana menikah lagi tanpa izin dari isteri sebelumnya pada dasarnya termasuk kepada tindak pidana pelanggaran terhadap kedudukan perdata. Ada 4 (empat) Pasal yang berhubungan dengan tindak pidana pelanggaran kedudukan perdata ini, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 277, 278, 279 dan Pasal 180 KUHP.

Pasal 277 KUHP disebut dengan tindak pidana “penggelapan terhadap kedudukan” yang dirumuskan adalah : “dengan suatu perbuatan sengaja menjadi keturunan orang tidak tertentu”, dan diancam dengan kemungkinan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak yang dimuat dalam Pasal 35 Nomor 1-4. Sama sekali tidak dijelaskan perbuatan apa yang kini dimaksudkan. Dapat dikatakan bahwa perbuatan ini hampir selalu berupa member keterangan palsu agar menjadi tidak tentu, apakah seorang tertentu adalah keturunan dari seorang bapak atau ibu, kakek atau nenek, begitu seterusnya. Dengan demikian akan hampir selalu ada gabungan tindak pidana ini dengan tindak pidana pemalsuan surat, yang termuat dalam title XII Buku II KUHP, yang dijadikan tidak tentu ini tidak hanya keturunan seseorang yang masih hidup, tetapi juga dapat mengenai seseorang yang sudah meninggal (**Wirjono Prodjodikoro**, 1981:92).

1. Diancam dengan pidana 5 (lima) tahun :

1a. barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

1b. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun

3. Dalam hal ini dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak yang termuat dalam Pasal 35 Nomor 1-4.

Dalam KUHP Belanda tindak pidana ini dinamakan *dubble huwalijke* atau bigami karena di Negeri Belanda, diantara seluruh warganya dianut prinsip monogamy maka tindak pidana semacam ini selalu mengakibatkan adanya 2 (dua) perkawinan. Di Indonesia, diantara para penganut agama Islam, ada kemungkinan seorang laki-laki secara sah mempunyai 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) isteri. Maka diantara mereka seorang laki-laki baru melakukan tindak pidana dari pasal 279 KUHP ini apabila ia melakukan perkawinan yang kelima setelah 4 (empat) kali melakukan perkawinan secara sah. Bagi si isteri, kawin kedua kali sudah merupakan tindak pidana ini.

Pasal 279 KUHP ayat (1) No. 2 mengenai seorang partner dalam perkawinan yang ia sendiri belum kawin, atau seorang lakilaki yang beragama Islam belum punya 4 (empat) isteri. Bagi penganut agama Hindu Bali yang mengizinkan seorang laki-laki mempunyai sejumlah isteri tanpa

batas, tindak pidana ini hanya dapat dilakukan oleh seorang isteri bersama partnernya, namun persoalannya adalah apabila perkawinan yang sudah ada tidak memenuhi syarat-syarat perundang-undangan sehingga dapat dibatalkan. Tentang hal ini ada dua pendapat :

1. Menurut Simons- Pompe dan Noyon- Langemeyer, pelaku tetap dapat dihukum karena perkawinan dahulu tetap ada sebelum dibatalkan.
2. Menurut Van Bemmelen, para pelaku tidak selalu dapat dihukum, tetapi ada kemungkinan bahwa ini digantungkan kepada penyelesaian suatu perkara perdata mengenai batal atau tidaknya perkawinan yang dulu itu.

3. Unsur-Unsur Perkawinan Dalam Pasal 279 Ayat (1) KUHP

Dihubungkan Dengan Pasal 279 KUH Pidana Tindak pidana poligami dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 279 tentang kejahatan terhadap asal-usul pernikahan yang berbunyi :

Ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :

- Ke-1. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
- Ke-2. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Ayat (2) jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam

- ke-1, menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (3) pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan.

Bila kita menjabarkan unsur-unsur dari pasal tersebut, maka akan diperoleh sebagai berikut:

Unsur Subyektif :

“Barangsiapa”

Unsur “barangsiapa” ini terkait dengan eksistensi seseorang sebagai subyek hukum. Hal ini terkait dengan kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban di depan hukum. Sehingga untuk memenuhi unsur “barangsiapa” tersebut, seseorang harus memenuhi kecakapan hukum baik secara hukum pidana maupun hukum perdata.

Unsur Obyektif :

1. Mengadakan perkawinan;

Maksud dari “mengadakan perkawinan” adalah bahwa perkawinan yang diselenggarakan dilakukan dengan melalui tata cara atau prosedur yang diatur dalam baik ketentuan hukum maupun kebiasaan masyarakat.

Sepasang calon mempelai tidak akan dapat disebut mengadakan perkawinan jika hanya berdua saja di dalam sebuah ruangan atau tempat tertutup, tanpa terpenuhinya syarat-syarat atau rukun nikah.

2. Mengetahui perkawinan-perkawinannya yang telah ada (angka

1)

Unsur ini mengandung makna bahwa seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan, secara sadar bahwa dirinya masih terikat oleh perkawinan dengan yang lain sebelumnya.

3. Mengetahui perkawinan-perkawinan pihak lain (angka 2)

Unsur ini mengandung makna bahwa pasangan dari calon mempelai, mengetahui dengan pasti bahwa calon suami/isterinya telah memiliki isteri/suami yang masih terikat di dalam perkawinan.

4. Adanya penghalang yang sah

Unsur ini bermakna bahwa kedua calon harus mengetahui sebelum melangsungkan perkawinan, maka harus terpenuhi terlebih dahulu unsur-unsur pada point ke 2 dan ke 3.

Jika sudah diketahui bahwa adanya salah satu pasangan yang masih terikat secara sah di dalam perkawinan dengan orang lain, maka sudah terpenuhi unsur ini.

Menurut Apeldoorn, bahwa elemen delik itu terdiri dari elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijke*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu, yang mengikuti rumusan unsur-unsur perbuatan pidana ini disamping Apeldoorn adalah Van Bemmelen.

Pendapat yang memberikan rumusan yang terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut Vos, di dalam suatu

strafbaarfeit (perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur tindak pidana, yaitu :

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*).
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang dalam terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang-kadang elemen akibat tidak penting dalam delik formil, akan tetapi kadangkadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materil,
3. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dalam kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*),
4. Elemen melawan (*wederechtheid*),
5. Dan sederetan elemen lain menurut rumusan undang-undang dan dibedakan menjadi segi objektif, misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen di muka hukum (*in het openbaar*) dan segi subjektif misalnya, Pasal 340 diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*).
6. Berdasarkan pemahaman tentang unsur-unsur perbuatan di atas, maka khusus untuk tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 279 KUH Pidana (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Barang siapa

- b. Yang kawin (mengadakan perkawinan)
- c. Sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi.

Unsur ke-2 mengadakan perkawinan

C. Tinjauan Umum Terhadap Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) (“UU Perkawinan”) perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, hukum perkawinan Indonesia berasaskan monogami.

Asas monogami lebih ditegaskan lagi di dalam bunyi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Di mana seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ini berarti sebenarnya yang disarankan oleh undang-undang adalah perkawinan monogami. Akan tetapi, Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian, sebagaimana dapat dilihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa :

- Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Zainal Abidin Abubakar, 1992:142).

Kalau diperhatikan sejarah perkawinan yang dilakukan oleh umat manusia diatas permukaan bumi ini, maka salah satu masalah atau perkara sampai sekarang masih tetap ada dan sering dibicarakan adalah masalah poligami.

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Perkawinan). Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu jika:

- isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pasal 5 ayat [1] Undang-Undang Perkawinan):

- adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan isteri / isteri-isterinya tidak diperlukan jika isteri / isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat [2] Undang-Undang Perkawinan).

Dalam Hukum Islam pengaturan tentang poligami merujuk pada Kompilasi Hukum Islam ("KHI"). Ketentuan KHI menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Hanya saja di dalam KHI dijelaskan antara lain bahwa pria beristeri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristeri lebih dari 4 (empat) orang. Selain itu, syarat utama seorang pria untuk mempunyai isteri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya (Pasal 55 KHI). Perkawinan menurut hukum Islam adalah

pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidlan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (Abdur Rahman, 1995:21).

Menurut KHI, suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 KHI).

Sama seperti dikatakan dalam Undang-Undang Perkawinan, menurut Pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang jika:

- isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan untuk menikah lagi harus jelas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan syarat lain untuk memperoleh izin Pengadilan Agama. Syarat-syarat tersebut juga merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, yaitu: (Pasal 58 KHI)

- adanya persetujuan isteri;

- adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pasal 58 KHI ini juga merujuk pada Pasal 41 huruf b [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan](#) ("PP 9/1975"), yang mengatakan bahwa persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

Jika si isteri tidak mau memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI). Dilarang atau dibolehkannya melakukan poligami lebih banyak ditentukan oleh tuntutan keadaan yaitu keadaan darurat (Khoiruddin Nasution, 1996:103-104).

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PP 9/1975 yang menyatakan bahwa:

"Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang".

izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas.

Menurut Mukti Ali, kedudukan izin untuk berpoligami menurut ketentuan di atas adalah wajib, sehingga apabila dilakukan tanpa lebih dahulu mendapat izin, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian perkawinan itu juga tidak sah karena dianggap tidak pernah telah terjadi. Keadilan yang disyaratkan dalam poligami mencakup kepada tiga pihak, yaitu : keadilan terhadap isteri-isteri, anak-anak yang dilahirkan dan keadilan terhadap diri sendiri (Ahmad Syalaby, 1990:6).

D. Pidana Dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana yang dimaksud disini adalah hukuman, menurut **R. Soesilo** (1995:35) yang dimaksud dengan hukuman ialah “suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan ponis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”. Pengertian lain diberikan oleh **Emanuel Kant** (**R. Soesilo**, 1995:35) yang mendefinisikan hukuman atau pidana adalah suatu pembalasan, definisi ini didasarkan atas pepatah kuno yang mengatakan “Siapa membunuh harus dibunuh”, namun ada juga yang mengartikan pidana sebagai media untuk menakut-nakuti orang supaya orang tersebut tidak melakukan kejahatan (tindak Pidana).

Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan (**Soerdjono Soekanto**, 1983:1), perangkat tersebut yang dimaksud adalah norma, kaidah, atau aturan.

2. Teori Tujuan Pidanaan

Secara umum dapat dikemukakan bahwa ada tiga kelompok teori pidana, yaitu : (1) teori absolut atau teori pembalasan (*retributive / vergeldings theorie*); (2) teori relatif atau tujuan (*utilitarian / doeltheorie*); dan (3) teori gabungan (*verenigings theorie*):

1) Teori Absolut

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quai peccatum est*). pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Misalnya, jika ada orang yang melakukan pembunuhan, maka pidana yang setimpal dengan perbuatannya adalah dengan dijatuhi pidana mati.

Menurut **Johannes Andenaes** (**Antonius Sudirman**, 2009:107) tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah sekunder.”

Menurut **Immanuel Kant** (**Antonius Sudirman**, 2009:108):

“Pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pemidanaan sebagai *kategorische imperative*, yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Jadi pidana bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).”

2) Teori Relatif

Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Dengan kata lain pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau peng-imbalan kepada orang yang melakukan kejahatan melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sekedar sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (*social defence*).

Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quai peccatum est*) melainkan “supaya orang jangan melakukan kejahatan” (*ne peccetur*).

Hal ini sesuai dengan pernyataan Seneca (**Antonius Sudirman**, 2009:109) seorang filsuf Romawi yang menegaskan:

“Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur (yang berarti: No reasonable man punished because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong-doing). Artinya, tidak seseorang normal pun dipidana karena telah melakukan perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat lagi.”

Jadi pidana itu diberikan/untuk mencegah timbulnya kejahatan, sehingga tampak sifat pidana, yaitu untuk :

- a. Menakut-nakuti orang agar orang takut melakukan kejahatan. Dengan adanya ketentuan pidana dalam undang-undang orang akan merasa takut untuk melakukan kejahatan.
- b. Memperbaiki perilaku si terpidana agar tidak mengulangi kejahatan.

Jika ada orang yang tidak takut lagi dengan adanya sanksi pidana dalam undang-undang sehingga melakukan tindak pidana (kejahatan), tetapi yang bersangkutan masih mungkin untuk diperbaiki lagi perilakunya, maka pidana yang dijatuhkan padanya harus bersifat mendidik agar tidak mengulangi tindak pidana.

- c. Membinasakan, apabila yang bersangkutan tidak bisa diperbaiki lagi.

Apabila ada tabiat atau perilaku dari pelaku kejahatan tidak dapat diperbaiki lagi, maka orang seperti ini harus dibinasakan atau dicabut hak hidupnya melalui penjatuhan pidana mati.

3) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan (*verenigings-theorien*), tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana disamping sebagai pembalasan juga diakui bahwa pidana memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun masyarakat. Penulis pertama yang mengajukan teori ini adalah Pellegrino

Rossi (1787-1884). Teorinya disebut sebagai teori gabungan karena pembedaan menurut Rossi, yakni selain sebagai upaya pembalasan juga mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi generale*.

Andi Hamzah (Antonius Sudirman, 2009:110) menegaskan bahwa secara garis besar teori gabungan dapat dibedakan atas tiga golongan sebagai berikut :

- a. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pembalasan.

Menurut teori ini bahwa pembalasan tetap ada (atau mutlak), tetapi diterapkan dengan kepentingan masyarakat.

- b. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pertahanan tata tertib masyarakat.

Menurut teori gabungan ini bahwa pidana tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan kegunaannya juga tidak boleh lebih berat dari pada yang seharusnya.

- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Selain ketiga teori tersebut diatas ada teori yang lain disebut teori pembebasan. Teori ini dikembangkan oleh J.E. Sahetapy, Menurut Sahetapy (**Antonius Sudirman, 2009:111**):

“Pembedaan sebaiknya bertujuan pembebasan. Pembebasan disini harus dilihat bukan dalam pengertian fisik, sebab secara fisik yang

bersangkutan sama sekali tidak mengalami perubahan, kecuali ruang geraknya dibatasi karena ia berada dalam lembaga pemasyarakatan. Namun, dalam keterbatasan ruang geraknya, ia dibebaskan secara mental dan spiritual. Dengan demikian ia seolah-olah mengalami suatu kelahiran kembali secara mental dan spiritual.”

3. Jenis-Jenis Pidana

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam bab ke 2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu :

- 1) Reglemen Penjara (stb 1917 NO. 708) yang telah diubah dengan (LN 1948 No. 77);
- 2) Ordonasi pelepasan bersyarat (stb 1917 No. 749);
- 3) Reglemen pendidikan paksaan (stb 1917 No. 741);
- 4) UU No. 20 tahun 1946 tentang pidana tutupan.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, jenis pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan

- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 tahun 1946).

Pidana tambahan terdiri dari :

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Pidana perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pidana pengumuman keputusan hakim

Jenis-Jenis pidana pokok :

1) Pidana Mati

Berdasarkan Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat karena pidana ini adalah pidana yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra bergantung pada kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :

- a. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat 2, Pasal 124 ayat 3 jo Pasal 129 KUHP)

- b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya : Pasal 140 ayat 3, Pasal 340 KUHP
- c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai dengan unsur atau faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat 4, Pasal 368 ayat 2 KUHP)
- d. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (Pasal 444 KUHP)

2) Pidana Penjara

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka ke dua jenis pidana itu tampaknya sama.

Stelsel pidana penjara, menurut Pasal 12 ayat, dibedakan menjadi (a) pidana penjara seumur hidup; dan (b) pidana penjara sementara waktu.

Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni :

- 1) Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat 4, Pasal 368 ayat 2 KUHP, dan

- 2) Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya : Pasal 106, Pasal 108 ayat 2 KUHP.

Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (Pasal 12 ayat 2 KUHP). Pidana penjara sementara waktu dapat atau mungkin dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat 3 KUHP.

3) Pidana Kurungan

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut :

- a. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak
- b. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus.
- c. Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan atau bekerja pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara
- d. Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28 KUHP)

- e. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan atau dieksekusi.

4) Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka atau nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang yang dipasaran. Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan, contoh : hakim bisa saja menjatuhkan pidana denda maksimum

pada petindak pelanggaran Pasal 362 pencurian sebuah mobil dengan pidana denda sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang dimaksudkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

Dalam praktik hukum selama ini, hampir hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia pernah terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946.

Jenis-Jenis Pidana Tambahan

1) Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgelijke daad*) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). Undang-Undang hanya memberikan kepada negara wewenang melalui alat atau lembaganya melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah :

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
- b. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersebjata/TNI
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- f. Hak menjalankan mata pencaharian

Sifat hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali bila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

Pasal 38 menentukan tentang lamanya waktu bila hakim menjatuhkan juga pidana pencabutan hak-hak tertentu.

- a. Bila pidana pokok yang dijatuhkan hakim pada yang bersangkutan berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu berlaku seumur hidup
- b. Jika pidana pokok yang dijatuhkan berupa pidana penjara sementara atau kurungan, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu maksimum lima tahun dan minimum dua tahun lebih lama dari pada pidana pokoknya
- c. Jika pidana pokok yang dijatuhkan adalah berupa pidana denda, maka pidana pencabutan hak-hak tertentu adalah paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.

Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal-pasal : 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375.

- a) Hak menjalankan jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata atau TNI
- c) Pidana pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- d) Hak menjadi penasihat hukum (*raadsman*) atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang bukan anak

sendiri, dan hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan bukan anak sendiri.

e) Hak menjalankan pencaharian.

2) Pidana Perampasan Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang.

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (Pasal 39), yaitu:

- a. Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat
- b. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

3) Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya terdapat dalam Pasal : 128, 206, 361, 377, 395, 405.

Setiap putusan hakim memang harus di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP, dulu Pasal 317 HIR). Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut bisa dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian itu, adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Makassar khususnya di Instansi Pengadilan Negeri Makassar. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa di kantor Pengadilan Negeri Makassar tersedia data yang diperlukan sebagai bahan analisis, data tersebut diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen perkara yang meliputi berita acara penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang.

B. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau

arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, peneliti turun langsung ke lapangan (Pengadilan Negeri Makassar) untuk mengumpulkan data dengan cara :

1. Wawancara, untuk menjaring data-data yang terkait dengan perumusan delik penyertaan dan alasan yang memberatkan pidana, maka dilakukan wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara ini.
2. Studi Dokumentasi, mempelajari berkas perkara seperti berita acara penuntutan, penyitaan dan Putusan Hakim.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Menikah Lagi

Tanpa Izin Dari Isteri Sebelumnya Dalam Putusan Perkara Nomor 757 / Pid. B / 2011 / PN. Mks.

1. Posisi kasus

Suparjo Rustam (terdakwa), pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2008, atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Teuku Umar 12 Lorong 07 Makassar, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan perkawinan dengan Risnawati (saksi), dimana perkawinannya yang terdahulu menjadi penghalang yang sah untuk melakukan perkawinan lagi.

Suparjo Rustam adalah suami sah dari Asmiati (saksi korban), mereka menikah secara resmi berdasarkan Akta Nikah Nomor: 4054766 yang dikeluarkan oleh KUA Paleteang Kabupaten Pinrang pada tanggal 05 Mei 2006, antara hubungan Suparjo Rustam dan Asmiati sebagai

suami isteri berjalan tidak harmonis, hingga akhirnya secara sepihak Suparjo Rustam memberi Asmiati surat talak akan tetapi secara resmi Asmiati dan Suparjo Rustam belum bercerai.

Pada tanggal 31 Agustus 2008, Suparjo Rustam telah menikahi Risnawati sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1106/87/IX/2008 tanggal 31 Agustus 2008 tanggal 02 September 2008 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar. Suparjo Rustam dan Risnawati melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Risnawati di Jl. Teuku Umar 12 Lorong 07 Makassar, dan terdakwa menikah tanpa seijin dengan Asmiati selaku isteri yang sah, dan dari pernikahan Suparjo Rustam dengan isteri terdahulunya (Asmiati) telah dikarunia 1 (satu) orang anak.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana menikah lagi tanpa izin dari isteri sebelumnya yang dilakukan oleh terdakwa Suparjo Rustam yang dibacakan pada persidangan dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal :

“Bahwa ia terdakwa Suparjo Rustam, pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Teuku Umar 12 Lorong 07 Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan

perkawinan dengan terdakwa Risnawati, dimana perkawinannya yang terdahulu menjadi penghalang yang sah untuk melakukan perkawinan lagi”.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Suparjo Rustam adalah suami sah dari saksi korban Asmiati, dimana mereka menikah secara resmi berdasarkan Akta Nikah Nomor: 4054766 yang dikeluarkan oleh KUA Paleteang Kab. Pinrang pada tanggal 05 Mei 2006.
- Bahwa antara hubungan terdakwa dan saksi korban sebagai suami isteri berjalan tidak harmonis, dimana akhirnya secara sepihak terdakwa memberi saksi korban surat talak akan tetapi secara resmi saksi korban dan terdakwa belum bercerai.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2008, telah menikahi Risnawati sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1106/87/IX/2008 tanggal 31 Agustus 2008 tanggal 02 September 2008 yang diterbitkan oleh KUA kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa dan saksi Risnawati melangsungkan pernikahan di rumah orang tua saksi Risnawati di Jl. Teuku Umar 12 Lr.07 Makassar, dimana terdakwa menikah tanpa seijin dengan saksi korban Asmiati selaku isteri yang sah.
- Bahwa dari pernikahan terdakwa dengan saksi korban Asmiati telah dikarunia anak 1 (satu) orang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa :

1. Alat bukti keterangan saksi-saksi (saksi Asmiati, saksi Patahuddin dan saksi Rismawati), yang diuraikan sebagai berikut :

Saksi Asmiati menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sebagai suami sah dari saksi korban.
- Bahwa benar saksi menikah dengan terdakwa pada bulan Mei 2006 secara agama Islam berdasarkan Akta Nikah Nomor: 4054766 yang dikeluarkan oleh KUA Paleteang Kec. Pinrang Kab. Pinrang pada tanggal 05 Mei 2006.
- Bahwa benar atas pernikahan antara saksi korban dengan terdakwa telah melahirkan seorang anak perempuan.
- Bahwa benar saksi korban dengan terdakwa terjadi perselisihan, dimana saat itu terdakwa meninggalkan rumah dan saat pergi terdakwa menginap di kantornya (kantor koperasi).
- Bahwa benar setelah beberapa hari terdakwa pergi pernah kembali ke rumah saksi akan tetapi selanjutnya pergi lagi dan tidak kembali.
- Bahwa benar saksi pernah menghubungi pihak keluarga terdakwa, dan saksi mendapatkan informasi dari keluarga terdakwa kalau terdakwa tidak berada di kota Makassar.
- Bahwa benar akhirnya saksi mengetahui kalau terdakwa telah menikah lagi dari penyampaian rekan saksi, dimana selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke Kantor KUA Kec. Tallo Makassar dan mendapatkan data kalau terdakwa telah menikah dengan perempuan atas nama Risnawati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1106/87/IX/2008 tanggal 31 Agustus 2008.
- Bahwa benar setelah terdakwa menikah, saksi pernah bertemu dengan terdakwa dimana saat itu saksi berharap agar terdakwa masih mau kembali dengan saksi dan saksi bersedia menerima anak dari hasil perkawinannya dengan perempuan Risnawati akan tetapi terdakwa lebih memilih perempuan Risnawati.
- Bahwa benar saksi tidak pernah bercerai dengan terdakwa hingga terdakwa menikah lagi.

- Bahwa benar saat akan menikahi perempuan Risnawati terdakwa tidak memberitahukan dan tidak meminta ijin kepada saksi selaku isteri yang sah.
- Bahwa benar saat bersama dengan terdakwa, terdakwa sering menyakiti/memukul saksi korban.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa keberatan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.

Saksi Patahuddin, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah menantu saksi.
- Bahwa benar saksi adalah orang tua/bapak kandung dari saksi Risnawati.
- Bahwa benar yang menjadi wali saat anak saksi menikah adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau sebelumnya terdakwa telah memiliki isteri yang sah sebagaimana pengakuan terdakwa kepadanya kalau dirinya masih bujangan.
- Bahwa benar saksi menikahkan anaknya yang bernama Risnawati dengan terdakwa bertempat di rumah saksi di Jl. Teuku Umar Makassar pada hari minggu pada bulan Agustus 2008.
- Bahwa benar yang menikahkan anak saksi dengan terdakwa adalah Imam Kelurahan Kaluku Bodoa.
- Bahwa benar dari pernikahan anak saksi dengan terdakwa telah membuahkan anak 1 (satu) orang.
- Bahwa benar saksi baru mengetahui kalau terdakwa telah mempunyai isteri setelah terdakwa dilaporkan ke kantor polisi oleh isteri pertamanya.

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi mau menerima terdakwa sebagai menantu oleh karena anak dan terdakwa saling mencintai.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.

Saksi Rismawati, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sebagai isteri dari terdakwa.
- Bahwa benar saat kenal dengan terdakwa, terdakwa mengaku sebagai seorang bujangan.
- Bahwa benar saksi mau diajak menikah oleh terdakwa karena pengakuan terdakwa sebagai seorang laki-laki yang belum berkeluarga.
- Bahwa benar saksi menikah resmi secara Islam dengan terdakwa, dimana pernikahan saksi dengan terdakwa berlangsung di rumah saksi Jl. Teuku Umar Makassar dan yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung saksi.
- Bahwa benar saat menikah keluarga/orang tua terdakwa turut hadir dan mengetahui pernikahan antara saksi dengan terdakwa.
- Bahwa benar atas pernikahannya dengan terdakwa telah melahirkan seorang anak perempuan.
- Bahwa benar saksi baru mengetahui kalau terdakwa memiliki isteri setelah mendapatkan sms yang masuk ke HP terdakwa yang menanyakan keberadaan terdakwa dan saat menanyakan siapa orang yang mengirim sms, saat itu terdakwa mengaku kalau yang mengirim sms adalah isteri pertama terdakwa dan saat itu barulah saksi mengetahui kalau terdakwa sebelumnya sudah menikah.
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa, saksi masih menerima terdakwa sebagai suami saksi.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.

2. Alat bukti surat :

- 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/15/VII/2008, tanggal 09 Juli 2008 atas nama Suparjo Rustam dan Asmiati;
- 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1106/87/IX/2008 tanggal 02 September 2008 atas nama Suparjo Rustam dan Risnawati.

3. Alat bukti petunjuk :

Berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh petunjuk akan adanya perbuatan terdakwa Suparjo Rustam yang telah melakukan pernikahan lagi tanpa seijin saksi korban (Asmiati) selaku isteri yang sah.

4. Alat bukti keterangan terdakwa (Suparjo Rustam), yang diuraikan sebagai berikut :

Terdakwa Suparjo Rustam, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Asmiati sebagai isteri pertama dari terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban menikah resmi secara Islam pada bulan Mei 2006 bertempat di Kab. Pinrang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 4054766 yang dikeluarkan oleh KUA Paleteang Kec. Pinrang Kab. Pinrang pada tanggal 05 Mei 2006.
- Bahwa benar atas pernikahannya dengan saksi korban telah melahirkan seorang anak.
- Bahwa benar atas pernikahannya dengan saksi korban terjadi perselisihan paham dimana saksi korban selalu mempermasalahkan masalah ekonomi keluarga yang kurang serta adanya campur tangan dari mertua terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa meninggalkan rumah oleh karena tidak tahan sering bertengkar dengan saksi korban dimana saat itu saksi korban telah menganggap terdakwa sudah meninggalkan saksi korban.
- Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2008, saksi menikah dengan saksi Risnawati, dimana saat itu terdakwa mengaku kalau terdakwa masih bujangan.
- Bahwa benar terdakwa menikah resmi secara Islam dengan saksi Risnawati bertempat di rumah saksi Risnawati dan yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung saksi Risnawati dan yang menikahkan adalah Imam kaluku Bodoa.
- Bahwa benar kepada bapak mertua terdakwa dan Imam Kaluku Bodoa terdakwa mengaku masih bujangan.
- Bahwa benar pernikahannya dengan saksi Risnawati tercatat pada Kantor KUA Tallo dengan No. 1106/87/IX/2008 tanggal 31 Agustus 2008.
- Bahwa benar saat terdakwa akan menikahi saksi Risnawati, terdakwa tidak menyampaikan/meminta ijin saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa tidak mau kembali lagi dengan saksi Asmiati dan akan mempertahankan pernikahannya dengan saksi Risnawati.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana menikah lagi tanpa izin dari isteri sebelumnya yang dilakukan oleh terdakwa Suparjo Rustam, maka penuntut umum mengajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan antara lain sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Suparjo Rustam bersalah melakukan tindak pidana melakukan pernikahan lagi dimana pernikahan terdahulu menjadi penghalang untuk melakukan pernikahan lagi, sesuai dengan Pasal 278 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suparjo Rustam dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku kutipan Akta Nikah Nomor: 227/15/VII/2008, tanggal 09 Juli 2008 atas nama Suparjo Rustam dan Asmiati, 1 (satu) buah buku kutipan Akta Nikah Nomor: 1106/87/IX/2008, tanggal 02 September 2008 atas nama Suparjo Rustam dan Risnawati dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Komentar Penulis.

Berdasarkan posisi kasus, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa Suparjo Rustam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pernikahan lagi dimana pernikahan terdahulu menjadi penghalang untuk melakukan pernikahan lagi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 278 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis dapat melihat penerapan hukum pidana materil dalam kasus tersebut sudah tepat, ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis pada hari Selasa tanggal 12

Februari 2013 dengan Bapak Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum. (salah satu Hakim) di Pengadilan Negeri Makassar yang mengatakan bahwa :

“Penerapan hukum pidana yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai, ini terlihat dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 278 ayat (1) ke-1 KUHP, artinya Jaksa Penuntut Umum terlihat sangat yakin dengan mendakwa terdakwa Suparjo Rustam menggunakan dakwaan tunggal (dan ternyata dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti di dalam sidang pengadilan), selain itu jika kita membaca secara seksama putusannya maka didapatkan bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan setelah disesuaikan satu dengan lainnya saling bersesuaian”.

Berikut penulis akan menguraikan unsur-unsur Pasal 278 ayat (1) ke-1 KUHP yang dilanggar oleh terdakwa :

Unsur Barang Siapa:

Yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum, yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yang mana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa yaitu terdakwa Suparjo Rustam (dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi);

Unsur melakukan pernikahan dengan seorang wanita:

Fakta yang terbukti di muka persidangan, dimana terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan saksi Risnawati, dimana sebelum melangsungkan pernikahan tersebut, terdakwa mengaku

sebagai seorang laki-laki yang belum menikah sehingga saksi Risnawati mau menjadi isteri dari terdakwa (dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi);

Dimana pernikahan terdahulu menjadi penghalang yang sah untuk melakukan perkawinan lagi:

Bahwa sesuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk diperoleh fakta bahwa sebelum menikah dengan saksi Risnawati, terdakwa adalah seorang laki-laki/suami yang terikat pernikahan dengan saksi Asmiati sebagai isteri pertama yang menikah secara sah menurut agama Islam, dengan dibuktikan adanya Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Paleteang Kab. Pinrang pada tanggal 05 Mei 2006, dimana dari pernikahannya dengan saksi Asmiati telah membuahkan seorang anak, dan saat akan menikahi perempuan Risnawati, terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Asmiati selaku isteri pertama (dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi);

Dari uraian unsur-unsur Pasal 278 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah penulis uraikan diatas, maka terbukti bahwa memang terdakwa Suparjo Rustam telah melanggar pasal tersebut dan telah memenuhi unsur-unsurnya.

Ada hubungan yang erat antara Pasal 237 KUHP dengan Pasal 279 KUHP yaitu sama-sama mengatur tentang perkawinan ganda, namun

perkawinan ganda yang lebih menyerupai esensi Pasal 237 KUHP, tetapi juga menyebutkan “meskipun dia tahu, bahwa perkawinannya sebelumnya menjadi penghalang sah untuk itu” yang hanya ditemui dalam Pasal 279 KUHP. Bagaimanapun, dengan disebutkannya anak kalimat terakhir itu, penerapan pasal dalam kasus diatas yang penulis bahas itu akan lebih menyerupai penerapan Pasal 279 KUHP. Dalam arti, bigami tidak dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi bigami akan dipidana, apabila ternyata perkawinan sebelumnya menjadi penghalang yang sah untuk itu.

B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Poligami Yang Tidak Mendapat Izin Dari Isteri Sebelumnya Dalam Putusan Perkara Nomor 757 / Pid. B / 2011 / PN. Mks

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak

hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 757 / Pid.B / 2011 / PN.Mks. yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim

Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap tindak pidana melakukan pernikahan lagi tanpa izin dari isteri sebelumnya yang dilakukan terdakwa Suparjo Rustam adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya meminta keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang bahwa, terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan Pengadilan Negeri Makassar telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang bahwa, terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa, terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 379 (1) KUHP.

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan dan mengakui segala perbuatannya.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan surat dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa, di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Asmiati sebagai isteri pertama dari terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban menikah resmi secara Islam pada bulan Mei 2006 bertempat di Kab. Pinrang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 4054766 yang dikeluarkan oleh KUA Paleteang Kec. Pinrang Kab. Pinrang pada tanggal 05 Mei 2006.
- Bahwa benar atas pernikahannya dengan saksi korban telah melahirkan seorang anak.
- Bahwa benar atas pernikahannya dengan saksi korban terjadi perselisihan paham dimana saksi korban selalu mempermasalahkan masalah ekonomi keluarga yang kurang serta adanya campur tangan dari mertua terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa meninggalkan rumah oleh karena tidak tahan sering bertengkar dengan saksi korban dimana saat itu saksi korban telah menganggap terdakwa sudah meninggalkan saksi korban.
- Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2008, saksi menikah dengan saksi Risnawati, dimana saat itu terdakwa mengaku kalau terdakwa masih bujangan.
- Bahwa benar terdakwa menikah resmi secara Islam dengan saksi Risnawati bertempat di rumah saksi Risnawati dan yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung saksi Risnawati dan yang menikahkan adalah Imam kaluku Bodoa.
- Bahwa benar kepada bapak mertua terdakwa dan Imam Kaluku Bodoa terdakwa mengaku masih bujangan.
- Bahwa benar pernikahannya dengan saksi Risnawati tercatat pada Kantor KUA Tallo dengan No. 1106/87/IX/2008 tanggal 31 Agustus 2008.
- Bahwa benar saat terdakwa akan menikahi saksi Risnawati, terdakwa tidak menyampaikan/meminta ijin saksi korban.

- Bahwa benar terdakwa tidak mau kembali lagi dengan saksi Asmiati dan akan mempertahankan pernikahannya dengan saksi Risnawati.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan setelah disesuaikan satu dengan lainnya saling bersesuaian.

Menimbang bahwa, dari rangkaian fakta-fakta tersebut, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa, sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa main hakim sendiri.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Memperhatikan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

2. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Suparjo Rustam secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pernikahan lagi dimana pernikahan terdahulu menjadi penghalang untuk melakukan pernikahan lagi”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/15/VII/2008, tanggal 09 Juli 2008 atas nama Suparjo Rustam dan Asmiati, 1 (satu) buah buku kutipan Akta Nikah Nomor:1106/87/IX/2008, tanggal 02 September 2008 atas nama Suparjo Rustam dan Risnawati dikembalikan kepada terdakwa;
- Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

3. Komentar Penulis.

Setiap perbuatan manusia mempunyai sebab yang merupakan faktor pendorong di lakukannya kejahatan tersebut. Faktor kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga menjadi penyebab utama seorang suami / isteri menikah lagi. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penerapan hukum Pidana baik dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan

Putusan Pengadilan di atas menurut analisis penulis sudah sesuai dengan hukum pidana materil (KUHP). Oleh karenanya pertimbangan hukum hakim menurut penulis pidana yang dijatuhkan sudah tepat karena selain majelis hakim memutus berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim juga telah mempertimbangkan dari semua faktor, sehingga pertimbangan hakim tersebut dianggap adil oleh para pihak (terdakwa dan korban), ini dibuktikan dengan tidak adanya yang keberatan dan masing-masing pihak merasa puas, selain itu juga faktor-faktor pertimbangan hukum hakim telah terpenuhi dengan menitikberatkan adanya alat bukti yang sah dan terpenuhi ditambah dengan keyakinan hakim itu sendiri.

Tujuan utama diterapkannya Pasal 279 KUHP ini adalah tidak lain hanya untuk melindungi posisi isteri atau suami yang menjadi pasangan sebelumnya. Jadi, Pasal 279 KUHP ini tidak melarang untuk menikah lagi (poligami). Namun, jika seorang suami melakukan poligami, dia harus melakukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu seorang suami dapat menikah lagi dengan syarat harus seizin isteri sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materil oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana menikah lagi tanpa izin isteri sebelumnya sudah sesuai karena Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum) sudah menjelaskan unsur tindak pidana menikah lagi tanpa izin isteri sebelumnya, selain itu adanya 4 (empat) alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan ternyata kesemuanya terbukti di Pengadilan, ini menunjukkan bahwa memang terdakwa Suparjo Rustam terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana poligami yang dilakukan oleh terdakwa

Suparjo Rustam dalam putusan perkara nomor : 757 / Pid.B / 2011 / PN.Mks dalam pertimbangan hukum oleh hakim sudah tepat karena telah mempertimbangkan dari semua faktor, sehingga pertimbangan hakim tersebut dianggap adil oleh para pihak (terdakwa dan korban), ini dibuktikan dengan tidak adanya yang keberatan dan masing-masing pihak merasa puas, selain itu juga faktor-faktor pertimbangan hukum hakim telah terpenuhi dengan menitikberatkan adanya alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih sadar dalam membina rumah tangga yang harmonis karena rumah tangga yang harmonis akan menciptakan kedamaian dalam rumah tangga dan dapat meminimalisir berpalingnya salah satu pasangan (baik itu seorang suami / isteri) kepada wanita atau laki-laki lain.
2. Diharapkan para hakim dalam menjatuhkan putusan selain perlu mempertimbangkan faktor sosiologis dari terdakwa juga harus mempertimbangkan akibat dari perbuatan para terdakwa termasuk juga kerugian yang ditimbulkan bagi pihak korban (khususnya psikis korban sehingga merasa malu terhadap masyarakat sekitar

karena dimadu merupakan suatu hal yang memalukan dalam hidup berumah tangga), agar pertimbangan hakim dapat seimbang dan putusan tersebut kedepannya dapat lebih obyektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdur Rahman, 1995. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Bagian 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Syalaby, 1990. *Sejarah Kebudayaan Islam*, Alih Bahasa Mukhtar Yahya, Jakarta: Pustaka Husna.
- Antonius Sudirman, 2009. *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*, Semarang: BP Undip Semarang
- Andi Hamzah, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Islah Gusmian, 2007. *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Marwa.

- Khoiruddin Nasution, 1996. *Riba dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACAdemia.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ninie Suparni, 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus, Kejahatan terhadap harta kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politea.
- R. Sughandi, 1981. *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Satjipto Rahardjo, 2006. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sulaiman Rasyid, 2001. *Fiqh Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Tongat, 2006. *Hukum Pidana Materil*, Malang: UMM pers.
- _____, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009. *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.

Yan Pramadya Puspa, 1977. *Kamus Hukum, Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu.

Zainal Abidin Abubakar, 1992. *Kumpulan Peraturan Perundang Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al Hikmah.

Sumber Lain :

<http://banjirembun.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-hukum-poligami.html>. Diakses Pada Hari Rabu, 28 November 2012, Pukul. 20:30 WITA.